



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKJIP)
KANTOR CAMAT GEROKGAK
TAHUN 2022**



**KANTOR CAMAT GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Berkat Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa kami telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2022 Kantor Camat Gerokgak, yang merupakan tugas instansi Pemerintah setiap akhir tahun sesuai dengan petunjuk yang ada.

LKjIP tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan dalam hal melaksanakan pembinaan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan umum di Kantor Camat Gerokgak.

Visi, Misi, tujuan, sasaran serta kebijaksanaan program dan kegiatan Kantor Camat Gerokgak Tahun 2022 telah direncanakan melalui Renstra yang telah disusun pada tahun 2017.-2022

LKjIP yang telah kami susun mudah-mudahan sesuai dengan petunjuk dan tentunya masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan kami dalam segala hal sehingga kami mengharapkan masukan dan saran sehingga LKjIP untuk tahun-tahun berikutnya lebih sempurna.

Gerokgak, 30 Desember 2022

Camat Gerokgak

Kerut Aryan, S, STP, MM

Nip.198303212002121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH.....	3
1.2 ISU STRATEGIS	14
1.5 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GEROKGAK	16
BAB II.....	18
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	18
2.1 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	18
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA	20
2.3 PERJANJIAN KINERJA	21
BAB III	23
AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA	23
3.1.1 Rumus yang digunakan	23
3.1.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	23
3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA DENGAN MEMBANDINGKAN KONDISI 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR SERTA ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN /KEGAGALAN DAN SOLUSI	24
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN DENGAN ANALISIS PENCAPAIAN KEBERHASILAN /KEGAGALAN DAN TINGKAT EFESIENSI	30
BAB IV	44
PENUTUP.....	44
4.1 SIMPULAN	44
4.2 LANGKAH PERBAIKAN KEDEPAN.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel – 1.1 Jumlah Dusun, Desa Pakraman, Sekeha Truna Truni, Subak Abian, Subak Sawah dan Pecalang di Kecamatan Gerokgak	5
Tabel – 1.2 Sanggar Seni dan Budaya di Kecamatan Gerokgak	6
Tabel – 1.3 Jumlah Club volley, sepak bola, silat, tenis meja, catur dan bulu tangkis di Kecamatan Gerokgak.....	6
Tabel – 1.4 Data Daerah Potensi Rawan Bencana	7
Tabel –1.5 Jumlah ASN (aparatur Sipil Negara) Kantor Camat Gerokgak Tahun 2022	8
Tabel – 1.6 Jumlah Aparatur Sipil Negara yang sudha mengikuti Diklat Penjenjangan tahun 2022	8
Tabel –1.7 Sedangkan data berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Kantor Camat Gerokgak tahun 2022	9
Tabel – 1.8 Data Pegawai berdasarkan Tingkat eselon	9
Tabel – 1.9 Jumlah Sarana dan Prasarana	10
Tabel–1.10 Program, kegiatan dan sub kegiatan	11
Tabel–1.11 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gerokgak.....	15
Tabel - 2.1 Ringkasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Buleleng	19
Tabel - 2.2 Perjanjian Kinerja Eselon III Kecamatan Gerokgak Tahun 2022	21
Tabel - 2.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Kecamatan Gerokgak Tahun 2022	22
Tabel - 3.1 Rincian Perbandingan Realisasi Anggaran Periode 5 Tahun	25
Tabel -3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah SKPD	27
Tabel -3.3 Evaluasi pelaksanaan Program /kegiatan.....	31
Tabel -3.3 Efisiensi Anggaran Kecamatan Gerokgak Tahun 2022	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Anggaran Tahun 2022 (Jenis Belanja)	14
Gambar 2. Anggaran Tahun 2022 (Program)	14
Gambar – 3 Struktur Organisasi Kecamatan Gerokgak	17

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Camat Gerokgak Tahun 2022 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana amanat Permenpan-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Kantor Camat Gerokgak telah **berhasil dengan kategori Baik (Total Capaian Sasaran Kantor Camat Gerokgak 96,28%)** dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarnya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran Belanja Operasi) dan Belanja barang jasa sebesar 96,28%. Dan belanja modal sebesar 92,27 %

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/ 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Camat Gerokgak Tahun 2022 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dasar Hukum

1. Undang–Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Permendagri No 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 70)
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 70);

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah :

a. Maksud

1. Untuk mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan;

2. Untuk mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

b. Tujuan

1. Untuk tertibnya pengadministrasian kegiatan;
2. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik;
3. Sebagai wujud pertanggungjawaban pada sektor publik yang berorientasi pada kinerja.

1.3 GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada ketentuan Pasal 25 ayat (6) yang berbunyi Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat, dan dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian urusan Bupati Buleleng kepada Camat, yang terdiri dari 1 (satu) bidang urusan yaitu:

1. Non Perijinan yang terdiri dari:

A. Koordinasi

1. Koordinasi penyelenggaraan bencana dengan tingkat kejadian ringan;
2. Koordinasi penagihan piutang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng terhadap pasien yang belum memenuhi kewajiban membayar;
3. Koordinasi Lomba Kebersihan dan Pertamanan antar kelurahan dan antar camat se Kabupaten Buleleng;
4. Koordinasi penyusunan program penyuluhan kehutanan dan perkebunan;
5. Koordinasi pendataan obyek pajak dan penyampaian SPPT;
6. Koordinasi pemantauan kemiskinan;
7. Koordinasi pemantauan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

B. Pembinaan

1. Pembinaan lingkungan bersih se kecamatan gerokgak;
2. Pembinaan pengelolaan air bersih pedesaan.

C. Pengawasan

1. Pengawasan terhadap sepadan/sumber daya air dan jaringan asset-aset irigasi;
2. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang.

D. Fasilitas

1. Fasilitas pembentukan Lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan;
2. Fasilitas pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah;
3. Fasilitas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

E. Penetapan

1. Penunjukan Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa/Perbekel, apabila kepala desa/perbekel cuti dan/atau berhalangan selama 14 (empat belas) hari sampai 6 (enam) bulan lamanya;
2. Peresmian pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan pada Kelurahan sesuai dengan wilayahnya.

F. Penyelenggaraan

1. Penyelenggaraan aksi bersama pemungutan sampah plastik di Kecamatan Gerokgak;
2. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disadari bahwa Pemerintah Kecamatan merupakan ujung tombak keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam hal penyelenggaraan pemerintah, ekonomi, pembangunan, lingkungan hidup, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu Kecamatan Gerokgak terus berupaya berbenah diri agar mampu mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang mampu memberikan pelayanan yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Jumlah penduduk 96.269 dan jumlah KK 29.659, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Laut Bali
Sebelah Selatan	:	Hutan Negara
Sebelah Barat	:	Kabupaten Jembrana
Sebelah Timur	:	Kecamatan Seririt

Letak wilayahnya berada pada permukaan geografis yang berbukit berada pada ketinggian 50 m dpl suhu maksimum dan minimum rata-rata 35 derajat celsius dengan curah hujan kurang lebih 893 mm/th. Secara administrasi wilayah kecamatan Gerokgak mencakup 14 (empat belas) desa, 77 banjar dan 14 desa pekraman, dan

36 banjar adat, dan luas wilayah 356,57 km dengan jumlah penduduk 99.269, jumlah penduduk laki-laki 50.218. orang dan perempuan 49.411 orang.

Tabel – 1.1

Jumlah Dusun, Desa Pakraman, Sekeha Truna Truni, Subak Abian, Subak Sawah dan Pecalang di Kecamatan Gerokgak

N O	Nama Desa	Jml. Dusun	Jml. DesaPekra man	Jml. SekehaT runaTru ni	Jml. Subak Abian	Jml. Subak Sawah	Jml. Pecalang
1	Tukad Sumaga	9	1	1	1	2	30
2	Celukanbawang	3	1	1	1	1	33
3	Tinga-tinga	5	1	1	-	1	34
4	Pengulon	3	1	1	1	1	15
5	Patas	7	1	1	1	3	35
6	Gerokgak	6	1	1	1	1	40
7	Sanggalangit	4	1	1	2	1	32
8	Musi	2	1	1	1	1	20
9	Penyabangan	4	1	1	1	1	28
10	Banyupoh	5	1	1	1	1	40
11	Pemuteran	9	1	1	-	2	50
12	Sumberkima	8	1	1	2	1	21
13	Pejarakan	9	1	1	-	1	15
14	Sumberkelampok	3	1	1	-	-	25
TOTAL		77	14	14	12	17	418

Sumber data: Kecamatan Gerokgak

Untuk dibidang pelestarian seni dan budaya ada beberapa desa yang memiliki sanggar seni yang aktif yaitu :

Tabel – 1.2
Sanggar Seni dan Budaya di Kecamatan Gerokgak

NO	Nama Desa	Jml. Sanggar seni	Jml. Tokoh Seni	Jenis Kesenian
1	Tukad Sumaga	-	1	-
2	Celukanbawang	-	1	-
3	Tinga-tinga	-	1	-
4	Pengulon	-	1	-
5	Patas	-	2	Gebugende
6	Gerokgak	2	4	-
7	Sanggalangit	1	6	Gebugende
8	Musi	-	1	Dewa ayu
9	Penyabangan	-	1	-
10	Banyupoh	-	1	-
11	Pemuteran	1	2	-
12	Sumberkima	-	1	-
13	Pejarakan	-	2	Gebugende
14	Sumberkelampok	-	1	-
TOTAL		4	25	

Sumber data: Kecamatan Gerokgak

Dan untuk di bidang olah raga kecamatan gerokgak memiliki beberapa club cabang olah raga yang aktif (volley, sepak bola, silat, tenis meja, catur dan bulu tangkis).

Tabel – 1.3
Jumlah Club volley, sepak bola, silat, tenis meja, catur dan bulu tangkis
di Kecamatan Gerokgak

NO	Nama Desa	Jml. Club volley	Jml. club sepak bola	Jml. Club silat	Jml. Club tenismeja	Jml. Club catur	Jml. Club bulutangkis
1	Tukad Sumaga	1	1	-	1	1	1
2	Celukanbawang	1	1	-	1	1	1
3	Tinga-tinga	1	1	-	1	1	1
4	Pengulon	1	1	-	1	1	1

5	Patas	1	1	1	1	1	1
6	Gerokgak	1	1	1	1	1	1
7	Sanggalangit	1	1	1	1	1	1
8	Musi	1	1	-	1	1	1
9	Penyabangan	1	1	-	1	1	1
10	Banyupoh	1	1	-	1	1	1
11	Pemuteran	1	1	-	1	1	1
12	Sumberkima	1	1	-	1	1	1
13	Pejarakan	1	1	-	1	1	1
14	Sumberkelompok	1	1	-	1	1	-
TOTAL		14	14	3	14	14	13

Sumber data: KecamatanGerokgak

Tabel – 1.4

Data Daerah Potensi Rawan Bencana

No.	Nama Desa	Bencana yang terjadi
1	Tukad Sumaga	- Tanah tergerus aliran sungai, Longsor, Kebakaran hutan
2	Celukanbawang	- Banjir
3	Tinga-tinga	- Banjir
4	Pengulon	- Banjir, Pohon perindang yang tumbang
5	Patas	- Banjir dan abrasi pantai
6	Gerokgak	- Banjir, Tanah longsor, banjir dan puting beliung
7	Sanggalangit	- Banjir
8	Musi	- Banjir
9	Penyabangan	- Banjir
10	Banyupoh	- Banjir dan Kebakaran hutan
11	Pemuteran	- Banjir dan Kebakaran hutan
12	Sumberkima	- Banjir, dan abrasi pantai
13	Pejarakan	- Banjir
14	Sumberkelompok	-

Sumber data: KecamatanGerokgak

a. Keadaan Pegawai

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Gerokgak didukung oleh 29 orang Pegawai Negeri dan 40 Tenaga Kontrakdan 1 orang menjadi Perbekel kemudian 1 orang di perbantukan di KPU Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel – 1.5

Jumlah ASN (aparatur Sipil Negara)
Kantor Camat Gerokgak Tahun 2022

N0	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Camat	1	-	-	-		1	1
2	Sekcam	1	-	-	-	1	-	1
3	Kasi Yandu	1	-	-	-	1	-	1
4	Kasi Sosbud	1	-	-	-	1	-	1
5	Kasi Pemerintahan	1	-	-	-	1	-	1
5	Kasi Pembangunan	1	-	-	-	1	-	1
6	Kasi Linmas dan Trantib	1	-	-	-	1	-	1
7	Kasubag Umumdan keuangan	1	-	-	-	1	-	1
8	Kasubag Perencanaan	-	1	-	-	1	-	1
9	Fungsional Umum	13	7	-	10	10	-	20
TOTAL		21	8	0	10	18	1	29

Tabel – 1.6

Jumlah Aparatur Sipil Negara yang sudah mengikuti Diklat Penjurangan tahun 2022,

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN	
		Laki	Perempuan
1	Diklat Pim III	2	
2	Diklat Pim IV	1	
3	Adum	1	
4	Sepada	0	
5	Struktural yang belum Diklat	4	1

Tabel – 1.7

Sedangkan data berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Kantor Camat Gerokgak tahun 2022

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	
		Laki-Laki	Perempuan
1	S2	1	
2	SI/D4	7	5
3	D3	-	
4	D2	-	
5	SMA/SMK/MTs	13	2
6	SMP/MI	-	
7	SD	-	
Jumlah		22	7

Tabel – 1.8

Data Pegawai berdasarkan Tingkat eselon

NO	ESELON	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Eselon IIIa	1	1	
2	Eselon IIIb	1	1	
3	Eselon Iva	5	5	
4	Eselon Ivb	2	1	1
Jumlah		9	8	1

Jika melihat dari peta jabatan Kecamatan Gerokgak sesuai dengan SIMPEG (analisis Jabatan dan Analisis bebanKerja) maka jumlah Pegawai Kecamatan Gerokgak yang seharusnya sebanyak 67 Orang namun baru terisi sebanyak 29 Orang atau secara proporsi baru terpenuhi sebesar 43.28 %

b. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka Kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai, baik sarana dan prasarana yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Adapun Jumlah dan Kondisi riil Sarana dan Prasarana Kecamatan Gerokgak Prasarana kerja dan pendukung lainnya, adalah sebagaiberikut:

Tabel – 1.9
Jumlah Sarana dan Prasarana

No	Nama	Jumlah	Kondisi
1	AC	11 unit	Baik /3 rusak
5	Almari	35 unit	Baik /28 rusak
6	SoundSytem	11 set	Baik /10 rusak
7	Komputer	9 buah	Baik/ 1 rusak
8	NoteBook/Laptop	9 buah	Baik
9	Printer	14 buah	Baik / 1 rusak
10	Meja Kerja	69 buah	Baik
11	Meja Rapat	91 buah	Baik
12	Kursi Rapat	50 buah	Baik
13	Filling Kabinet	6 buah	Baik
14	Kamera	1buah	Baik
16	TV	7 buah	Baik
17	Kendaraan Dinas Roda4	1unit	Baik
19	Kendaraan Dinas Roda2	13unit	Baik

c. Program kegiatan dan sub kegiatan

Kecamatan Gerokgak melaksanakan 5 program ,9 kegiatan dan 30 sub kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan table di bawah ini

Tabel – 1.10
Program, kegiatan dan sub kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
1.	PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
2.1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.1.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.1.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.1.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.1.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.1.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.1.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.1.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.1.6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu
3.1.7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.1.1.	Penyediaan Jasa Suat Menyurat
4.1.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik
4.1.3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.1.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.1.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

	5.1.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenaraan Perorangan Dinas
	5.1.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
	5.1.3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5.1.4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	5.1.5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	PROG. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	2.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
	2.1.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3.	PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	3.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	3.1.1.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4.	PROG. KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	4.1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	4.1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	4.1.2.	Koordinasi/Sinergi Dengan Prangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5.	PROG. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	5.1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	5.1.1.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

5.1.2.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
5.1.3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
5.1.4.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
5.1.5.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
5.1.6.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
5.1.7.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
5.1.8.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

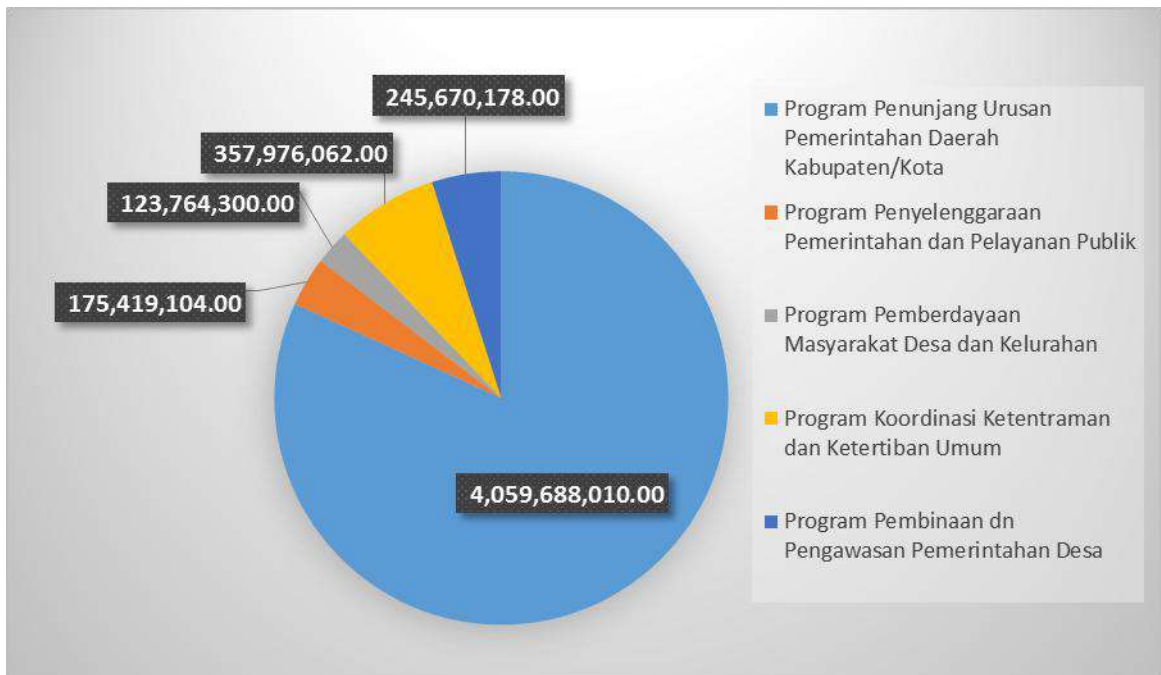
d. Keadaan keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Gerokgak pada tahun 2022 berasal dari APBD Kabupaten Buleleng. Pada tahun anggaran 2022 Kecamatan Gerokgak mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar Rp 4.962.517.654,00 dengan rincian Belanja operasi sebesar Rp 4.962.517.654,00, Belanja barang/jasa sebesar Rp 1.701.023.920 dan belanja modal sebesar Rp. 95.303.300 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja Langsung yang berasal dari APBD tersebut dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan 5 (Lima) program yang terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dan sub Kegiatan 30 (Tiga puluh) sesuai Rencana Kinerja Kecamatan Gerokgak Tahun 2022. Keadaan keuangan sesuai Gambar di bawah ini

Gambar 1.
 Anggaran Tahun 2022 (Jenis Belanja)



Gambar 2.
 Anggaran Tahun 2022 (Program)



1.2 ISU STRATEGIS

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 2 (dua) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Gerokgak yaitu permasalahan

pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional. Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Gerokgak dapat dilihat kondisi pelayanan Pemerintah Kecamatan Gerokgak pada table D.1 sebagai berikut :

Tabel – 1.11

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gerokgak

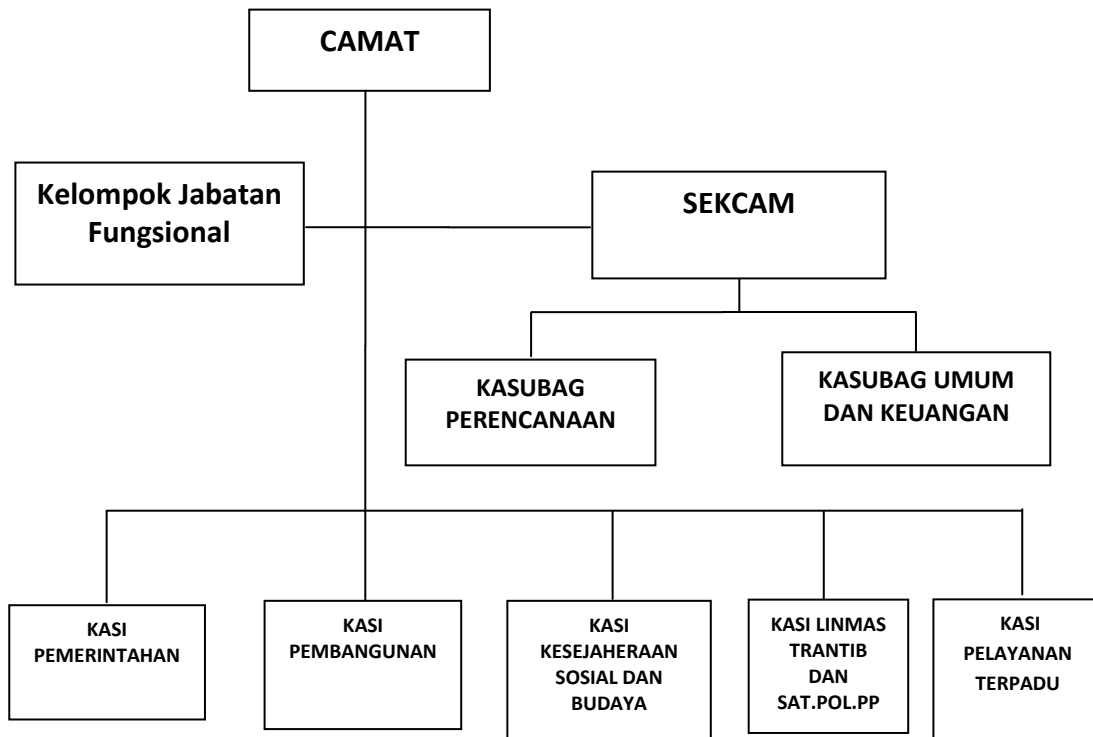
NO	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		BELUM TERCAPAI (<)		
		SESUAI (=)		
		MELAMPAUI (>)		
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Belum Tercapai (88) baik	1. Belum optimalnya Penanganan sampah di desa	1. Adanya inovasi
			2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan aplikasi aku online unt cetak ktp-el sudah membawa no pendaftaran dari aku online di desa	
				2. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut .
2	Persentase desa / kelurahan yang memenuhi	Belum tercapai ketepatan waktunya	1. Belum optimalnya ketepatan waktu dalam membuat administrasi	1. Ketersediaan dana dan sinergitas antar program.

	kriteria administrasi baik			2. Ketersediaan Pedoman, Acuan serta regulasi yang mendasari penyusunan peraturan di Desa tepat waktu. Ketersediaan Anggaran yang memadai
				2. Juknis dari kabupaten sering terlambat.
				3. Pedoman berupa Juknis dan pedoman Regulasi dari Pemerintah Atasan sering terlambat, minimnya anggaran
3	Persentase desa dengan IDM status maju	Belum tercapai	1. Data dimasing-masing desa belum akurat	1. Perlu pendataan kembali
			2. Penyusunan profil desa datanya belum akurat	

1.5 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GEROKGAK

Struktur Organisasi Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng di bentuk berdasarkan peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kantor Camat Gerokgak yang mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai berikut :

Gambar – 3
Struktur Organisasi Kecamatan Gerokgak



Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Gerokgaktahun 2022 sebagai berikut:

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan Penjelasan umum Organisasi ,dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang di hadapi

BAB II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, pada bagian ini menyajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis,dan perjanjian Kinerja pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin dicapai instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian Visi dan Misi Kepala Daerah

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, Pada bagian ini menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja,evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingandata kinerja secara memadai keberhasilan /kegagalan dan permasalahan yang dihadapiserta langkah –langkah antisipasi yang akan diambil

BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Tahun 2022 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu ***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”*** dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kecamatan Gerokgak telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng khususnya di Kecamatan Gerokgak dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor- faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD) dan RENSTRA Kecamatan Gerokgak. Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kecamatan Gerokgak Tahun 2022

Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah periode 2017-2022 yang selengkapnya di tuangkan dalam tabel di bawah ini

Tabel - 2.1

Ringkasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Buleleng

VISI	MISI	SASARAN DAERAH
Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri Sejahtera dan Berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana	memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi 2. Meningkatkan akses dan kesempatan kerja penduduk usia produktif 3. Meningkatkan perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin 4. Meningkatkan kapasitas fiskal Daerah untuk Pembiayaan Pembangunan
	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis pada produk Unggulan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan nilai produk pertanian 2. Berkembangnya industri pengolahan berbasis komoditas unggulan daerah 3. Meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM serta Koperasi
	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional ,Berbudaya dan Intergeritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan 2. Meningkatkan kualitas pemuda dan olah raga 3. Meningkatkan status kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan 4. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik
	Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan partisipasi dasinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Insfatuktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketrediaan insfratruktu untuk pemenuhan pelayanan publik
	Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan apresiasi nilai budaya dan kearifan local 2. Terjaganya kualitas lingkungan hidup

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kecamatan Gerokgak menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes atau output penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan organisasi. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan Gerokgak merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja.

Setelah menetapkan Indikator Kinerja Utama setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan penjelasan/perhitungan yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, sesuai amanat PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Kecamatan Gerokgak, guna mewujudkan ukuran keberhasilan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan dapat dilihat dalam **Lampiran** Indikator Kinerja Utama.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja Kantor Camat Gerokgak tahun 2022 adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Gerokgak tahun 2017 – 2022. Penetapan Kinerja tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Kantor Camat Gerokgak Kabupaten Buleleng untuk mencapainya dalam tahun 2022. Adapun Perjanjian Kinerja Eselon III pada Kecamatan Gerokgak seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel - 2.2

Perjanjian Kinerja Eselon III Kecamatan Gerokgak Tahun 2022

No.	SASARAN/ CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Terpenuhinya standar pelayanan public	Persentase pemenuhan standar pelayanan publik	84 %	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
	Meningkatnya komitmen aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan	Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten) yang sesuai dengan ketentuan	95 %	
		Jumlah pembinaan bank sampah	14	
2	Terwujudnya tata kelola administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase desa/kelurahan yang memenuhi kriteria administrasi baik	95	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Terwujudnya tata kelola keuangan desa	Prosentase Pelaporan Keuangan Desa/Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan	95%	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3	Terwujudnya perencanaan pembangunan desa yang sesuai ketentuan	Jumlah desa/kelurahan yang menyusun perencanaan pembangunan desa	14	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah lembaga/kelompok yang aktif dalam pembangunan desa	14	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
		% Laporan gangguan ketentraman, Kenyamanan dan ketertiban Wilayah dan bencana Alam yang ditindaklanjuti	99 %	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Perjanjian Kinerja Eselon IV

Sasaran Renstra yang diselaraskan dijadikan dasar dalam menyusun Perjanjian Kerja Kepala SKPD. Kemudian Perjanjian Kinerja Kepala SKPD tersebut dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon IV sebagai pelaksana teknis terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Camat Gerokgak. Perjanjian Kinerja Eselon IV Kantor Camat Gerokgak Tahun 2022, ditampilkan pada lampiran LKJIP ini.

Tabel - 2.3

Perjanjian Kinerja Eselon IV Kecamatan Gerokgak Tahun 2022

NO	URAIAN	TARGET	%
1	Belanja operasi	4.867.214.354	
2	Belanja barang /jasa	1.701.023.920	
3	Belanja modal	95.303,300	
	Jumlah	4.4.962.517.654	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran diperoleh melalui penghitungan dengan formulasi tertentu, dan difokuskan pada indikator kinerja strategis. Penetapan cara pengukuran capaian kinerja meliputi :

3.1.1 Rumus yang digunakan

Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

3.1.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja

Hasil pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikatnya sebagai berikut :

Capaian kinerja > 85 sd 100% : Sangat berhasil

Capaian kinerja >70 sd <85% : Berhasil Capaian kinerja >55 sd <70% : Cukup

berhasil Capaian kinerja < 55 sd 0% : Tidak berhasil

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Perbandingan Target dan Realisasi digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada target kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, dan hasil. Adapun rincian penjelasan indikator kinerja dimaksud adalah sebagai berikut :

- Input (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan suatu keluaran, seperti berupa dana, SDM, informasi dan sebagainya

- Output (keluaran) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung tercapai dari suatu kegiatan, baik yang berupa fisik maupun proses dari kegiatan.
- Outcome (hasil) adalah fungsi dari keluaran yang dapat dimanfaatkan atau merupakan pengukuran hasil dari output. sesuai dengan tabel di bawah ini

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA DENGAN MEMBANDINGKAN KONDISI 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR SERTA ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN /KEGAGALAN DAN SOLUSI

Sebelum membahas target dan realisasi kinerja Tahun 2022, berikut kami sampaikan realisasi keuangan SKPD secara makro, sebagai capaian yang tidak terpisahkan dan sangat mendukung capaian kinerja selama 5 tahun terakhir

Realisasi keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Gerokgak Tahun 2022 mencapai 96,28 %. Angka tersebut diperoleh dari rata-rata realisasi keuangan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung,

Capaian kinerja program dan kegiatan pada kantor camat gerokgak selama 5 tahun terakhir dapat di tampilkan dalam tabel seperti berikut di bawah ini :

TABEL - 3.1

RINCIAN PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN PERIODE 5 TAHUN

KECAMATAN GEROKGAK TAHUN 2022

KO DE	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)														
		(1)	(2)													
		2018	Realisasi	%	2019	Realisasi	%	2020	Realisasi	%	2021	Realisasi	%	2022	Realisasi	%
701 01	1. PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN BULELENG	1,269,989,486	1,240,163,365	97.65	1,295,544,895	1,269,861,747	98.02	2,794,113,780	2,672,187,847	95.64	3,137,022,356	3,101,418,954	98.87	4,059,688,010	3,888,741,265	95.79
701 02	2. PROG. PENYELENG GARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	117,123,244	116,984,200	99.88	97,592,200	97,286,300	99.69	83,103,500	83,103,500	100.00	21,187,300	20,800,000	98.17	175,419,104	171,916,709	98.00

701 03	3.	PROG. PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	567,252,450	565,009,890	99.60	788,423,704	785,138,500	99.58	86,470,300	86,470,300	100.00	17,502,100	16,883,500	96.47	123,764,300	121,119,852	97.86
701 04	4.	PROG. KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	227,495,000	226,466,000	99.55	236,614,800	236,228,700	99.84	256,871,300	256,845,190	99.99	1,307,727,200	1,275,827,192	97.56	357,976,062	355,747,215	99.38
701 06	5.	PROG. PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA	183,652,070	183,576,335	99.96	230,425,400	229,889,100	99.77	121,976,100	121,976,100	100.00	63,426,500	62,421,500	98.42	245,670,178	240,320,551	97.82
JUMLAH TOTAL			2,365,512,250	2,332,199,790	98.59	2,648,600,999	2,618,404,347	98.86	3,342,534,980	3,220,582,937	96.35	4,546,865,456	4,477,351,146	98.47	4,962,517,654	4,777,845,592	96.28

Dengan pencapaian realisasi keuangan yang mencapai **96.28%**, maka hal tersebut mendukung dari capaian kinerja Tahun 2022. Tahun 2022 merupakan tahun kedua periode Renstra 2017-2022, dalam hal ini, target kinerja yang tertuang dalam Tahun 2022 adalah target Tahun kedua dari Renstra 2017-2022 sesuai indikator-indikator kinerja yang telah dirumuskan. Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2022 merupakan pedoman target yang harus dicapai oleh masing-masing pelaksana kegiatan dengan pembiayaannya yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran Kecamatan Gerokgak. Berikut akan kami sampaikan perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Gerokgak Tahun 2022 adalah seperti tabel di bawah ini :

Dari perbandingan target dan capaian kinerja diatas dapat dilihat secara umum target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sesuai dengan target Renstra Kecamatan Gerokgak 2017-2022.

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah SKPD

No.	SASARAN/ CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REA LISA SI	% Capai an	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	90	89	89	hasil survey dari Masyarakat tentang Indek Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan Umum di Kecamatan menunjukkan hasil baik
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	% Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	100%	14	100%	Dari hasil musrenbang 2020, tercatat 90% usulan telah diakomodir dalam BA hasil musrenbangdes dan musrenbangcam Gerokgak
3	Terwujudnya Keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban	Jumlah Laporan keamanan,kenyamanan, Ketentraman, Ketertiban Wilayah dan Bencana	14	14	100%	Dari hasil laporan bencana yang terjadi di Kecamatan Gerokgak sudah bisa ditangani dan di

	wilayah	alam ditindaklanjuti				tindaklanjuti
4	Meningkatannya Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga adat ,sekaa/sanggar seni yang berprestasi	14	Dari 14 Desa yang ada di Kecamatan gerokgak hanya 1 Desa yang mewakili kecamatan untuk mengikuti lomba lembaga adat Pada Tahun 2020 dan lomba Desa adat tingkat kabupaten meraih juara 1 yang di wakili oleh Desa Penyabangan dan lomba UKS sekretariat Kecamatan meraih Juara 2 Tingkat Propinsi
5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	% Desa yang administrasi pemerintahannya baik	100% %	Dari 14 Desa yang ada di Kecamatan Gerokgak 11 Desa yang Administrasi Pemerintahan baik

Dengan melihat perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan target jangka menengah SKPD yang dituangkan dalam Renstra SKPD Tahun 2017-2022 dapat digambarkan beberapa secara umum telah dapat tercapai dengan baik.

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Gerokgak ditentukan ada 5 sasaran dengan 9 indikator kinerja dan 30 Sub Kegiatan Tingkat keberhasilan kinerja sesuai indikator-indikator tersebut juga beragam, seperti telah ditampilkan pada data dan laporan di atas. Analisis terhadap keberhasilan atau kegagalan terhadap indikator tersebut sebagai berikut :

- a. Indikator persentase (%) desa yang memiliki administrasi umum pemerintahan dengan kualifikasi baik, terealisasi 90,97 % yaitu terdapat 14 desa yang ada di Kecamatan Gerokgak telah memiliki administrasi umum pemerintahan dengan kualifikasi baik. Keberhasilan itu didukung oleh sistem pembinaan administrasi pemerintah desa oleh Tim Pembina Kecamatan yang dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan, pada satu tahun dilaksanakan pembinaan minimal 2 (dua) kali di masing-masing desa dan bisa lebih dari 3 kali untuk desa yang dianggap masih lemah.

- b. Indikator persentase (%) tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang Desa dan Kecamatan dengan target 100.% dan realisasi 96,78 % yang diakomodir dalam Berita Acara Musrenbangdes dan Kecamatan, pada Tahun 2022. Keberhasilan melampaui target disebabkan sistem Musrenbang yang sudah diperbaiki. Sistem yang dimaksud adalah SKPD memberikan daftar program dan kegiatan yang ada di masing-masing SKPD, kemudian desa mengusulkan usulan yang ada pada program dan kegiatan tersebut, sehingga usulan desa dan kegiatan yang ada di SKPD bisa nyambung.
- c. Indikator Jumlah Laporan Ketentraman, Ketertiban dan Bencana yang ditindaklanjuti, terealisasi 99,37%. Tahun 2022, semua laporan yang masuk sudah ditindaklanjuti.
- d. Indikator Jumlah Linmas Desa yang aktif, terealisasi 700 orang, terealisasi 100%. Linmas yang aktif dilihat dari jumlah linmas yang telah mengikuti pelatihan dasar-dasar linmas di Kecamatan sampai dengan Tahun 2022
- e. Indikator Jumlah Lembaga Adat, Sekaa/Sanggar Seni yang berprestasi, terealisasi 3 Desa , 2 Sekaa/Sanggara dan lomba membuat ogoh –ogoh tingkat Kecamatan ada 3 (tiga) desa yang memperoleh juara yaitu juara 1 diraih oleh Desa Patas, Juara 2 (dua) diraih oleh Desa Pemuteran dan Juara 3 (Tiga) diraih oleh Desa Banyupoh karena adanya pandemi covid -19 tahun 2022 sehingga kegiatan lomba ditiadakan agar mengurangi kerumunan masyarakat
- f. Target kinerja ini merupakan target tahunan Lembaga Adat, Sekaa/Sanggar Seni yang mengikuti lomba dan hasilnya selain dipengaruhi pembinaan yang dilaksanakan juga ditentukan oleh Tim Penilai yang menilai lomba-lomba dimaksud.
- g. Indikator persentase (%) responden yang puas terhadap pelayanan perijinan dan non perijinan, terealisasi 97,98 % (Hasil IKM menunjukkan 100,% menyatakan puas melebihi target yang diharapkan yaitu 98%). Keberhasilan ini didukung oleh perbaikan dan penyempurnaan layanan PATEN di Kecamatan Gerokgak Tahun 2022.
- h. Indikator jumlah desa yang lingkungannya bersih dan asri, terealisasi 14 desa Indikator tersebut baru diukur dari ada tidaknya sistem pengelolaan sampah di desa karena pengelolaan sampah sangat berpengaruh pada kebersihan dan keasrian lingkungan.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN DENGAN ANALISIS PENCAPAIAN KEBERHASILAN /KEGAGALAN DAN TINGKAT EFESIENSI

Dalam pelaksanaan Program Kegiatan dan sub kegiatan yang di laksanakan pada tahun 2022 Pemerintah Kecamatan Gerokgak dapat mempertanggung jawabkan laporan keuangan selama 1 tahun berjalan yang setiap bulannya menyampaikan laporan keuangan dan mengadakan evaluasi pengendalian program /kegiatan dan dengan ini kami lampiran tabel evaluasi program /kegiatan di bawah ini :

Tabel - 3.3
Evaluasi pelaksanaan Program /kegiatan

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN		INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATU AN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA- RATA CAPAIAN KINERJA (%)
				ANGGARAN (Rp)	KOEFISIE N/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFIS IEN/ VOLUM E		ANGGARAN/ KEUANGAN	OUTCOME /OUTPUT	
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
7.01.01	1	PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BULELENG	Meningkatnya Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng	4,059,688,010.00	100.00	3,888,741,265.00	97.70	%	95.79	97.70	96.74
7.01.01.2.02		1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	3,289,614,163.00	100.00	3,164,902,601.00	100.00	%	96.21	100.00	98.10
7.01.01.2.02.01		1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	3,166,190,434.00	12.00	3,041,478,941.00	12.00	bulan	96.06	100.00	98.03
7.01.01.2.02.03		1.1.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujiann /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujiann /Verifikasi Keuangan SKPD	123,423,729.00	12.00	123,423,660.00	12.00	bulan	100.00	100.00	100.00

7.01.01.2.06		1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	310,370,714.00	100.00	291,909,011.00	95.33	%	94.05	95.33	94.69
7.01.01.2.06.01		1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,593,800.00	12.00	3,551,706.00	12.00	bulan	98.83	100.00	99.41
7.01.01.2.06.02		1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95,303,300.00	13.00	87,938,400.00	8.82	buah	92.27	67.85	80.06
7.01.01.2.06.04		1.2.3	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik	129,471,900.00	12.00	120,923,000.00	12.00	bulan	93.40	100.00	96.70
7.01.01.2.06.05		1.2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	11,913,714.00	17,839.00	11,913,100.00	17,838.00	lembar	99.99	99.99	99.99
7.01.01.2.06.06		1.2.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,251,000.00	12.00	5,234,500.00	12.00	bulan	99.69	100.00	99.84
7.01.01.2.06.08		1.2.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	40,517,000.00	540.00	40,310,800.00	537.25	orang	99.49	99.49	99.49
7.01.01.2.06.09		1.2.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24,320,000.00	12.00	22,037,505.00	12.00	bulan	90.61	100.00	95.31

7.01.01.2.08		1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	379,542,615.00	100.00	357,683,094.00	95.52	%	94.24	95.52	94.88
7.01.01.2.08.01		1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48,286,960.00	12.00	48,286,872.00	12.00	bulan	100.00	100.00	100.00
7.01.01.2.08.02		1.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48,556,000.00	12.00	41,576,246.00	12.00	bulan	85.63	100.00	92.81
7.01.01.2.08.03		1.3.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	153,508,445.00	12.00	151,014,116.00	11.00	bulan	98.38	91.67	95.02
7.01.01.2.08.04		1.3.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129,191,210.00	37.00	116,805,860.00	33.45	jenis	90.41	90.41	90.41
7.01.01.2.09		1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayarkan	80,160,518.00	100.00	74,246,559.00	99.95	%	92.62	99.95	96.29
7.01.01.2.09.01		1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2,450,000.00	14.00	2,255,000.00	14.00	Unit	92.04	100.00	96.02

7.01.01.2.09.02		1.4.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48,100,518.00	12.00	45,760,059.00	12.00	bulan	95.13	100.00	97.57
7.01.01.2.09.06		1.4.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,460,000.00	12.00	6,559,000.00	12.00	bulan	69.33	100.00	84.67
7.01.01.2.09.09		1.4.4	Pemeliharaan Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13,150,000.00	1.00	12,687,500.00	1.00	Unit	96.48	100	98.24
7.01.01.2.09.10		1.4.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7,000,000.00	12.00	6,985,000.00	11.97	bulan	99.79	99.75	99.77
7.01.02	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	175,419,104.00	100.00	171,916,709.00	100.00	%	98.00	100.00	99.00
7.01.02.2.04		2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang dilaksanakan	175,419,104.00	100.00	171,916,709.00	100.00	%	98.00	100.00	99.00

7.01.02.2.04.03		2.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	175,419,104.00	14.00	171,916,709.00	14.00	desa	98.00	100.00	99.00
7.01.03	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	123,764,300.00	100.00	121,119,852.00	100.00	%	97.86	100.00	98.93
7.01.03.2.01		3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	123,764,300.00	100.00	121,119,852.00	100.00	%	97.86	100.00	98.93
7.01.03.2.01.03		3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	123,764,300.00	14.00	121,119,852.00	14.00	desa	97.86	100.00	98.93
7.01.04	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	357,976,062.00	100.00	355,747,215.00	100.00	%	99.38	100.00	99.69
7.01.04.2.01		4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	122,618,484.00	14.00	122,053,384.00	100.00	desa	99.54	100.00	99.77

7.01.04.2.01.01		4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	122,618,484.00	14.00	122,053,384.00	14.00	desa	99.54	100.00	99.77
7.01.04.2.01		4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang di tindaklanjuti	235,357,578.00	14.00	233,693,831.00	100.00	desa	99.29	100.00	99.65
7.01.04.2.01.01		4.1.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	235,357,578.00	14.00	233,693,831.00	14.00	desa	99.29	100.00	99.65
7.01.06	5		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	245,670,078.00	14.00	240,320,551.00	100.00	desa	97.82	100.00	98.91
7.01.06.2.01		5.1	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	245,670,078.00	14.00	240,320,551.00	100.00	desa	97.82	100.00	98.91

7.01.06.2.01.01		5.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11,471,975.00	14.00	11,471,975.00	14.00	desa	100.00	100.00	100.00
7.01.06.2.01.02		5.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17,950,000.00	14.00	16,329,650.00	14.00	desa	90.97	100.00	95.49
7.01.06.2.01.03		5.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3,346,475.00	14.00	3,345,350.00	14.00	desa	99.97	100.00	99.98
7.01.06.2.01.05		5.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	74,037,159.00	14.00	74,037,178.00	14.00	desa	100.00	100.00	100.00
7.01.06.2.01.09		5.1.5	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	26,958,400.00	14.00	26,092,900.00	14.00	desa	96.79	100.00	98.39
7.01.06.2.01.12		5.1.6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	3,300,000.00	14.00	3,300,000.00	14.00	desa	100.00	100.00	100.00
7.01.06.2.01.17		5.1.7	Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	102,762,269.00	14.00	100,735,948.00	14.00	desa	98.03	100.00	99.01

7.01.06.2.01.18		5.1.8	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaaan di Wilayah Kecamatan	5,843,800.00	14.00	5,007,550.00	14.00	Desa	85.69	100.00	92.84
JUMLAH TOTAL					4,962,517,554.00	100.00	4,777,845,592.00	99.54		96.28	99.54	97.91

Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Dengan adanya 5 program, 9 kegiatan dan 30 sub Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Gerokgak, tentunya semua kegiatan tersebut saling menunjang dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan. Termasuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kesekretariatan. Walaupun beberapa kegiatan memang memiliki dan berhubungan langsung dengan target kinerja, tapi selalu saling mempengaruhi antar kegiatan yang dilaksanakan. Tahun 2022, kegiatan yang paling mempengaruhi keberhasilan kinerja adalah :

- a. Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan
- b. Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup
- c. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan
- d. Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu
- e. Penyusunan Profil Kecamatan
- f. Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah
- g. Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Desa
- h. Pembinaan dan Pelestarian Adat dan Budaya
- i. Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa
- j. Pembinaan Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan
- k. Selalu Mengadakan Evaluasi program Kegiatan pada kantor Camat Gerokgak
- l. Selalu Menyesuaikan Anggaran Kas dalam melaksanakan Program /Kegiatan
- m. Mengadakan Pergeseran apabila kegiatan tidak bisa dilaksanakan

Sedangkan kegiatan yang masih perlu dianalisa baik sistem maupun sumber dayanya, karena Tahun 2022 belum bisa mencapai target kinerja secara optimal adalah :

- a. Sarana dan Prasarana yang belum memadai sehingga kurang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah.
- b. Masih terdapat anggaran yang tersisa dan harus dikembalikan ke kas daerah yang mana merupakan salah satu kendala ketidakberhasilan dalam hal pelaksanaan anggaran urusan pemerintahan dalam hal penanganan administrasi keuangan, yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sumber daya manusia, ketentuan peraturan/ regulasi keuangan yang dinamis yang terus berubah sehingga menjadi kendala dalam realisasi perencanaan program, keadaan geografis kewilayahan karena kondisi relief keadaan alam wilayah Kecamatan Gerokgak melintang membentang, dari segi ketepatan waktu pelaporan.
- c. Bagian Kepegawaian, masih kurang/minimnya kualitas SDM pegawai secara teknis operasional terutama mengenai pengetahuan komputerisasi teknologi dengan kata lain masih *gaptek* (gagap teknologi), kurang optimalnya beberapa

pegawai meskipun terdapat banyak pegawai, dengan kata lain inisiatifitas untuk belajar dan bertanya masih kurang.

Setiap permasalahan/kendala yang timbul pasti tidak lepas dengan beberapa solusi yang diambil guna mengatasi, mengurangi, bahkan meminimalisir permasalahan yang timbul, solusi yang dimaksud diantaranya :

1. Melihat permasalahan diatas dibutuhkan beberapa alternative solusi guna menyelesaikan dan meminimalisir permasalahan yang ada, diantaranya meliputi: di dalam melaksanakan pelaksanaan anggaran pada Kantor Camat Gerokgak di bidang urusan pemerintahan dibutuhkan beberapa unsur dalam hal pelaksanaannya baik itu dari unsur SDM yaitu peningkatan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan-pelatihan yang berhubungan terutama dengan tata cara pelaksanaan anggaran/keuangan, dengan mencantumkan pengetahuan/didikan moralitas, etika pemerintahan, komunikasi pemerintahan. Penanaman pemahaman efisiensi dan efektifitas kinerja.
2. Dalam hal kepegawaian, sangatlah perlu ditingkatkan inisiatif rasa ingin tahu, banyak belajar dan bertanya.

Tingkat Efisiensi

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Gerokgak adanya anggaran yang belum bisa di realisasikan sesuai dengan target yang di harapkan karena adanya efisiensi keuangan dan adanya penawaran harga belanja /negosiasi dr P2Bj tahun 2022 seperti tabel di bawah ini

Tabel - 3.4

EFISIENSI ANGGARAN KECAMATAN GEROKGAK TAHUN 2022

KODE PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)	REALIASASI (Rp.)	EFESIENSI (Rp.)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
70101	1.	PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BULELENG	4,059,688,010.00	3,888,741,265.00	170,946,745.00
70101202	2.1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,289,614,163.00	3,164,902,601.00	124,711,562.00
7010120201	2.1.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,166,190,434.00	3,041,478,941.00	124,711,493.00

7010120203	2.1.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	123,423,729.00	123,423,660.00	69.00
70101206	3.1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	310,370,714.00	291,909,011.00	18,461,703.00
7010120601	3.1.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,593,800.00	3,551,706.00	42,094.00
7010120602	3.1.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95,303,300.00	87,938,400.00	7,364,900.00
7010120604	3.1.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129,471,900.00	120,923,000.00	8,548,900.00
7010120605	3.1.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,913,714.00	11,913,100.00	614.00
7010120606	3.1.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,251,000.00	5,234,500.00	16,500.00
7010120608	3.1.6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40,517,000.00	40,310,800.00	206,200.00
7010120609	3.1.7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24,320,000.00	22,037,505.00	2,282,495.00
70101208	4.1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	379,542,615.00	357,683,094.00	21,859,521.00
7010120801	4.1.1.	Penyediaan Jasa Suat Menyurat	48,286,960.00	48,286,872.00	88.00
7010120802	4.1.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik	48,556,000.00	41,576,246.00	6,979,754.00
7010120803	4.1.3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	153,508,445.00	151,014,116.00	2,494,329.00
7010120804	4.1.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129,191,210.00	116,805,860.00	12,385,350.00
70101209	5.1.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80,160,518.00	74,246,559.00	5,913,959.00
7010120901	5.1.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenaraan Perorangan Dinas	2,450,000.00	2,255,000.00	195,000.00
7010120902	5.1.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	48,100,518.00	45,760,059.00	2,340,459.00
7010120906	5.1.3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,460,000.00	6,559,000.00	2,901,000.00
7010120909	5.1.4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13,150,000.00	12,687,500.00	462,500.00

7010120910		5.1.5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7,000,000.00	6,985,000.00	15,000.00
70102	2.	PROG. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		175,419,104.00	171,916,709.00	3,502,395.00
70102204		2.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	175,419,104.00	171,916,709.00	3,502,395.00
7010220403		2.1.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	175,419,104.00	171,916,709.00	3,502,395.00
70103	3.	PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		123,764,300.00	121,119,852.00	2,644,448.00
70103201		3.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	123,764,300.00	121,119,852.00	2,644,448.00
7010320103		3.1.1.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	123,764,300.00	121,119,852.00	2,644,448.00
70104	4.	PROG. KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		357,976,062.00	355,747,215.00	2,228,847.00
70104201		4.1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	357,976,062.00	355,747,215.00	2,228,847.00
7010420101		4.1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	122,618,484.00	122,053,384.00	565,100.00
7010420201		4.1.2.	Koordinasi/Sinergi Dengan Prangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	235,357,578.00	233,693,831.00	1,663,747.00
70106	5.	PROG. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		245,670,178.00	240,320,551.00	5,349,627.00
70106201		5.1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	245,670,178.00	240,320,551.00	5,349,627.00
7010620101		5.1.1.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11,471,975.00	11,471,975.00	-

7010620102		5.1.2.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17,950,000.00	16,329,650.00	1,620,350.00
7010620103		5.1.3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3,346,475.00	3,345,350.00	1,125.00
7010620105		5.1.4.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	74,037,259.00	74,037,178.00	81.00
7010620109		5.1.5.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	26,958,400.00	26,092,900.00	865,500.00
7010620112		5.1.6.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	3,300,000.00	3,300,000.00	-
7010620117		5.1.7.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	102,762,269.00	100,735,948.00	2,026,321.00
7010620118		5.1.8.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5,843,800.00	5,007,550.00	836,250.00
JUMLAH TOTAL				4,962,517,654.00	4,777,845,592.00	184,672,062.00

Demikian yang dapat kami sampaikan, untuk lebih sempurnanya LKJIP ini kami minta saran dan gagasan yang bersifat membangun yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan acuan laporan berikutnya. Terimakasih.

BAB IV

PENUTUP

4.1 SIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban, LKJIP Kantor Camat Gerokgak ini merupakan sarana introspeksi diri bagi seluruh komponen yang terlibat didalamnya, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Kecamatan Gerokgak, sebagaimana tercermin dalam misinya bertekad dapat menciptakan pemerintahan yang akuntabel, sejalan dengan maksud tersebut, maka dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2022 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang secara garis besarnya meliputi perbaikan intern organisasi, dan pembinaan kepada instansi pemerintah dibawahnya.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Camat Gerokgak Tahun 2022 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana amanat Permenpan-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Kantor Camat Gerokgak telah **berhasil dengan kategori Baik (Total Capaian Sasaran Kantor Camat Gerokgak 96,28%)** dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarnya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran Belanja Operasi) dan Belanja barang jasa sebesar 96,28%. Dan belanja modal sebesar 92,27 %

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh Satuan yang terkait yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Kantor Camat Gerokgak tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.

4.2 LANGKAH PERBAIKAN KEDEPAN

Pemerintah Kecamatan Gerokgak telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Selain itu, indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pada tahun ini, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu pelaksanaan, sehingga diharapkan pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

Gerokgak, 30 Desember 2022

Camat Gerokgak,



Kent Aryawan, S.STP, MM

Pembina

NIP. 198303212002121001